

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan mengenai kesimpulan dan rekomendasi penulisan skripsi yang berjudul “Posisi Partai Keadilan Sejahtera Dalam Panggung Pemilihan Umum Dan Peranannya Dalam Lembaga Legislatif DPR (1999-2014). Kesimpulan merujuk pada pembahasan bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah.

5.1 Kesimpulan

Permasalahan yang diangkat dan menjadi fokus dalam penelitian ini mengenai bagaimana Posisi Partai Keadilan Sejahtera dalam Panggung Pemilihan Umum dan peranannya dalam lembaga legislatif DPR (1999-2014). Kesimpulan ini memaparkan beberapa pokok pikiran yang merupakan inti dari permasalahan yang telah dikaji oleh peneliti. Adapun kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

Pertama, situasi politik Indonesia pada kurun waktu 1970-1998. Pada tahun 1970-1998 merupakan masa pemerintahan yang dipegang oleh Soeharto atau yang dikenal sebagai masa Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat dalam bidang pembangunan, maka tak heran Soeharto mendapat julukan Bapak Pembangunan. Namun disamping itu, tidak dapat dipungkiri bahwa pada masa pemerintahan Soeharto, kebebasan berpolitik sangatlah dibatasi bahkan partai politik tidak diberi ruang untuk berkembang dan melaksanakan fungsi-fungsinya secara maksimal dalam sistem politik demokrasi. Dalam praktiknya pada tahun 1968-1990 Soeharto mulai menampakkan kecurigaan terhadap umat Islam. Hal itu dipengaruhi Revolusi Islam di Iran yang mencapai puncaknya dengan runtuhnya rezim Syah Reza Pahlavi oleh para fundamentalis muslim, yang pada akhirnya menjadi akar kecurigaan antara pemerintah dan umat Islam dimana pemerintah khawatir kelompok muslim menggunakan akidahnya untuk menghancurkan negara.

Desi Alkautsar, 2017

*POSISI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PANGGUNG PEMILIHAN UMUM
DAN PERANANNYADALAM LEMBAGA LEGISLATIF DPR (1999-2014)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berangkat dari permasalahan diatas, pemerintahan Orde Baru secara tidak langsung membatasi gerak umat Islam yang berpolitik. Toleransi hanya diberikan kepada umat Islam yang tidak mengembangkan aspirasi politik. Pemberlakuan Asas Tunggal Pancasila yang mulai diganggu pemerintah pada tahun 1982 tidak lain adalah untuk menghadang ideologi lain dan menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas tunggal bagi semua partai politik. Ketika periode 1990-an kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap umat Islam sedikit demi sedikit mulai berubah. Soeharto mulai membuka komunikasi dengan umat Islam dan mendukung serta memfasilitasi kepentingan Islam politik terlihat dari didirikannya lembaga ICMI, BMI. Hingga pada akhirnya diujung kekuasaan Orde Baru terjadi krisis moneter yang sangat hebat serta merajalelanya KKN dan penyimpangan moral, pada tahun 1998 Soeharto dipaksa lengser dari jabatan Presiden yang telah didudukinya selama 32 tahun.

Kedua, proses lahirnya Partai Keadilan Sejahtera. Runtuhnya pemerintahan Orde Baru membuka keran demokrasi politik di Indonesia. Reformasi 1998 melicinkan jalan bagi kebebasan politik, dimana pada saat itu partai-partai politik didirikan sesuai dengan pandangan politik masyarakat. Salah satu partai berbasis agama yang lahir pada tanggal 20 Juli 1998 yaitu PK (Partai Keadilan) yang kemudian berganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) pada tanggal 20 April 2002. Berdirinya PK tidak dapat dilepaskan dari gerakan dakwah kampus yang kerap kali disebut Jamaah Tarbiyah. Karena basis atau embrio PK memang gerakan dakwah yang pada saat itu terinspirasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir yang didirikan oleh Hasan al-Banna. Dakwah kampus kemudian bermetamorfosis menjadi unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang resmi, yaitu Lembaga Dakwah Kampus yang merupakan embrio dari Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Dengan memanfaatkan pertemuan tahunan FSLDK ke-10 di Malang pada 1998 yang dihadiri oleh ratusan mahasiswa dari seluruh penjuru Indonesia, melalui KAMMI akhirnya didirikanlah partai yang kemudian diberi nama PK (Partai Keadilan). Setelah mengikuti pemilihan umum pertama kalinya pada tahun 1999, ternyata PK tidak dapat memperoleh batas minimal suara (*electoral threshold*) yang menjadi syarat mengikuti pemilu

selanjutnya. Atas dasar tersebut, mereka harus mengganti nama, kemudian pada tanggal 20 April 2002 PK resmi mengganti nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Ketiga, Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemilihan Umum tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Sejak berdirinya Partai Keadilan (PK) hingga bermetamorfosis menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai ini telah mengikuti pemilihan umum sebanyak empat kali terhitung sejak pemilu tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 dengan perolehan suara yang fluktuatif dan cukup signifikan. Pada pemilu 1999 PK memperoleh 1.436.565 suara atau sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional. Kegagalan PK dalam mencapai ambang batas parlemen yakni 2% membuat partai ini harus mengganti nama berdasarkan regulasi pemerintah. Kemudian setelah mengganti nama menjadi PKS, partai ini kembali mengikuti pemilu legislatif tahun 2004 dan mengalami pencapaian yang luar biasa. PKS berhasil meraih 7,34% suara atau 8.325.020 dan berhasil mendudukkan 45 wakilnya di DPR. Dalam pemilu berikutnya tahun 2009, PKS kembali naik dalam perolehan suaranya meskipun tidak terlalu signifikan. PKS memperoleh suara 7,88% suara atau 57 kursi di parlemen dan menduduki peringkat empat dalam perolehan suara secara nasional. Sedangkan di pemilu tahun 2014, PKS harus kehilangan sedikit suara dengan memperoleh 8.480.204 suara atau 6,79%. Dalam empat kali pemilu tersebut PKS telah mendudukkan para wakilnya di DPR sebanyak 149 kursi. Dalam menjangkau suara pemilih pada pemilu, partai politik terus mencari strategi dan metode yang efektif untuk dapat menyampaikan dan meyakinkan kepada masyarakat bahwa partai politik merekalah yang paling layak dipilih saat pemilu berlangsung. Begitupun dengan PKS, PKS memiliki strategi untuk menjangkau suara pada setiap pemilihan umum, yang pada intinya PKS menggunakan strategi dakwah pada setiap kampanye. Dari perolehan suara tersebut meskipun PKS terhitung partai baru, namun PKS mampu menarik cukup banyak suara dalam setiap pemilihan umum dan kunci PKS dalam melaksanakan kampanye yaitu terletak pada daya jangkauan kadernya yang luas.

Keempat, peranan PKS dalam lembaga legislatif DPR. Peranan atau kontribusi Partai Keadilan Sejahtera erat kaitannya dengan hakekat politik Partai

Desi Alkautsar, 2017

*POSISI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DALAM PANGGUNG PEMILIHAN UMUM
DAN PERANANNYADALAM LEMBAGA LEGISLATIF DPR (1999-2014)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Keadilan Sejahtera yaitu politik Islam yang dasarnya Islam dan visinya dakwah. Untuk mendapatkan dukungan sosial masyarakat dan mengaktualisasikan Partai Keadilan Sejahtera di tengah masyarakat, maka Partai Keadilan Sejahtera mencanangkan aksi kerja sosial di tengah masyarakat. Adapun prinsip kegiatan yang akan dilakukan di masyarakat tetap mengacu kepada *syumuliyah* (universalitas) dan *takamuliyah* (integralitas) Islam. Dengan kata lain harus menyentuh semua aspek kehidupan dakwah dan masyarakat, serta ada saling keterkaitan antara program-program tersebut. Adapun melalui perencanaan yang modern, disiplin organisasi yang kuat, dan tingkat militansi kader yang tinggi, saat ini Partai Keadilan Sejahtera mampu memperluas basis konstituennya dari kelas menengah bergerak menuju kelas bawah, melalui program-program praksis ditingkat masyarakat bawah. Secara umum peranan PKS dalam lembaga legislatif yakni membuat undang-undang atau legislasi, penyusunan anggaran atau *budgeting*, dan pengawasan jalannya pemerintah atau *controlling*. Pada faktanya dalam bidang politik, PKS sedikit banyak telah berkontribusi mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik. Selain itu mewujudkan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat ialah cita-cita yang disuarakan oleh PKS. Fraksi PKS dalam lembaga legislatif DPR sejatinya tetap konsisten untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan tidak segan mendukung program pemerintah yang mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Dengan demikian, maka arah pembangunan Indonesia yang dicitakan oleh Partai Keadilan Sejahtera adalah terbentuknya masyarakat yang menjadikan nilai-nilai tauhid sebagai landasan tata kehidupan mereka dan menjalankan politik keadilan serta menegakkan keadilan politik bagi masyarakat dengan moralitas yang bersih, peduli, dan profesional.

5.2 Rekomendasi

Penelitian ini berfokus kepada posisi Partai Keadilan Sejahtera dalam pemilihan umum dan peranannya dalam lembaga legislatif DPR. Sehingga selanjutnya penulis berharap ada pengembangan penelitian yang mengangkat tokoh PKS dalam bidang politik maupun peranannya dalam mewujudkan masyarakat madani. Berikut merupakan beberapa rekomendasi yang diajukan oleh peneliti sebagai berikut:

Pertama, rekomendasi untuk lembaga Universitas Pendidikan Indonesia, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai wahana menambah khasanah pengetahuan mengenai partai politik Islam yang lahir di masa reformasi yakni Partai Keadilan Sejahtera serta kiprahnya dalam pemilihan umum maupun peranannya dalam lembaga legislatif DPR.

Kedua, untuk satuan pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan informasi atau referensi pembelajaran sejarah pada masa orde baru dan reformasi khususnya sejarah partai politik Islam. Dalam Kurikulum 2013 materi mengenai Orde Baru dan Reformasi dipelajari di kelas XII pada semester 1 sesuai dengan Kompetensi Dasar (KD) 3.8 Mengevaluasi perkembangan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan pada masa Orde Baru dan Reformasi. Sehingga siswa dapat memahami bagaimana situasi politik yang terjadi pada masa Orde Baru dan partai-partai politik yang bermunculan ketika masa reformasi.

Ketiga, untuk peneliti selanjutnya apabila ada yang ingin menulis mengenai Partai Keadilan Sejahtera, dapat menuliskan secara mendalam mengenai salah satu tokoh pendiri atau pemuka Partai Keadilan Sejahtera dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Peneliti selanjutnya juga dapat menganalisis secara mendalam kajian historis Partai Keadilan Sejahtera dalam mendukung maupun mengkritik kebijakan pemerintah.

Demikianlah kesimpulan dan rekomendasi yang dipaparkan oleh peneliti. Semoga dapat bermanfaat bagi Universitas Pendidikan Indonesia untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan, dan juga untuk satuan pendidikan dalam memahami situasi politik yang terjadi di Orde Baru dan Reformasi, serta skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.